

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Pendidikan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	247	DISDIK	
2	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	460	DISDIK	
3	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	DISDIK	
4	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1293	DISDIK	
5	Pendidikan	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	894	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pendidikan	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	576	DISDIK	
7	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	302	DISDIK	
8	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	206	DISDIK	
9	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	DISDIK	
11	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	724	DISDIK	
12	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	709	DISDIK	
13	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3476	DISDIK	
14	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1944	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3100	DISDIK	
16	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1794	DISDIK	
17	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1441	DISDIK	
18	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	615	DISDIK	
19	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	919	DISDIK	
20	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	518	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2812	DISDIK	
22	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1692	DISDIK	
23	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	163	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	70	DISDIK	
25	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	756	DISDIK	
26	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	398	DISDIK	
27	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	206	DISDIK	
28	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	DISDIK	
30	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	724	DISDIK	
31	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	709	DISDIK	
32	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3476	DISDIK	
33	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1944	DISDIK	
34	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3100	DISDIK	
35	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1794	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1441	DISDIK	
37	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	615	DISDIK	
38	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	919	DISDIK	
39	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	518	DISDIK	
40	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2812	DISDIK	
41	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1692	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	163	DISDIK	
43	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	70	DISDIK	
44	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	756	DISDIK	
45	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	398	DISDIK	
46	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		DISHUB	
48	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5	DISDIK	
49	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	104	DISDIK	
50	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	90	DISDIK	
51	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	77	DISDIK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	163	DISDIK	
53	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	DISDIK	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

URUSAN Kesehatan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	15	DINKES	
2	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	DINKES	
3	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
4	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah dokter, bidan dan perawat	DINKES	
5	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
6	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	
7	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
8	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	
9	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	
11	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
12	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	
13	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
14	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	
15	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
16	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	
17	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
18	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
20	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	
21	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
22	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	
23	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
24	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	
25	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
26	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter, bidan dan perawat	DINKES	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	7170	DPUPR	
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPR	
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	ada	DPUPR	i). 254 meter : Bangunan perkuatan tebing (m) ii). 98.924 meter : Tanggul Sungai (m) iii). - : Kanal bajir (m) iv) 1 Unit : Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v). - : Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi). 3 Unit : Polder/Kolam Retensi (Unit) vii). - : Breakwater (m) viii). - : Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Capaian : 36.97 % Dengan rincian : Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) : 3685 ----- x 100 % Panjang jaringan irigasi primer (m) : 9967	DPUPR	
16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Capaian : 13.72 % Dengan rincian : Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (M) : 675 ----- x 100 % Panjang jaringan irigasi sekunder (m) : 4920	DPUPR	
17	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Capaian : NaN % Dengan rincian : Panjang jaringan irigasi tersier kondisi baik (m) : 0 ----- x 100 % Panjang jaringan irigasi tersier (m) : 0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
18	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ada	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak	DPUPR	
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD Perumda Tirta Mayang	DPUPR	
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	DPUPR	
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	DPUPR	
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	DPUPR	
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2684	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah Untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	DPUPR	
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	939	DPUPR	
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1004	DPUPR	
28	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1004	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Capaian : NaN % Dengan rincian : Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik : 0 ----- x 100 % rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha :	DPUPR	
30	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Capaian : 1.48 % Dengan rincian : Rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT : 2737 ----- x 100 % Rumah di wilayahnya pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha : 185519	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Capaian : 1.45 % Dengan rincian : Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD : 2684 ----- x 100 % rumah di wilayah pengembangan SPALDT : 185519	DPUPR	
32	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Capaian : 1.48 % Dengan rincian : Jumlah yang memiliki akses unit pengolahan setempat : 2737 ----- x 100 % jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S : 185519	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Capaian : 9.09 % Dengan rincian : Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia : 6 ----- x 100 % Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/Kota : 66	DPUPR	
34	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Capaian : 0.03 % Dengan rincian : Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia : 126 ----- x 100 % Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota : 371036	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD : 2684 ----- x 100 % Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota : 2684	DPUPR	
36	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Capaian : 0.51 % Dengan rincian : Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot : 939 ----- x 100 % Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayahnya pengembangan SPADLD-S : 185852	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku : 0 ----- x 100 % Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) : 0	DPUPR	
38	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	3228	DPUPR	
39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda kota jambi no.3 tahun 2015	DPUPR	
40	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		DPRKP	
41	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	DPUPR	
43	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	377	DPUPR	
44	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	258	DPUPR	
45	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	510,452 KM	DPUPR	
46	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	0	DPUPR	
47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yg dibangun	16 meter	DPUPR	
48	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	10633	DPUPR	
49	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	12	DPUPR	
50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	13269	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	266	DPUPR	
52	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	3333	DPUPR	
53	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	8	DPUPR	
54	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3	DPUPR	
55	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	DPUPR	
56	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	77	DPUPR	
57	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	DPUPR	
59	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	DPUPR	
60	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	DPUPR	
61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	DPUPR	
63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	DPUPR	
64	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	77	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	DPUPR	
66	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	DPUPR	
67	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	212	DPUPR	
68	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR	
70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR	
71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	212	DPUPR	
72	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	DPUPR	
73	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DPUPR	
74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUK badan usaha dan TDUP yang disetujui	212	DPUPR	
76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
77	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN
78	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR	SURAT KETERANGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Perumahan Rakyat KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	DPRKP	
2	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	DPRKP	
3	Perumahan Rakyat	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	DPRKP	
4	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKP	
5	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKP	
6	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKP	
7	Perumahan Rakyat	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DPRKP	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Perumahan Rakyat	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	DPRKP	
9	Perumahan Rakyat	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DPRKP	
10	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	tidak ada	DPRKP	
11	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP	
12	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	tidak ada	DPRKP	
13	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP	
15	Perumahan Rakyat	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DPRKP	
16	Perumahan Rakyat	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	76,51 ha	DPRKP	
17	Perumahan Rakyat	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	731 unit	DPRKP	
18	Perumahan Rakyat	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	4,12 ha	DPRKP	
19	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah di kab/kota	152.919 unit	DPRKP	
20	Perumahan Rakyat	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	731 unit	DPRKP	
21	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni	6176 unit	DPRKP	
22	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang tidak dihuni	6176 unit	DPRKP	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Perumahan Rakyat	Rasio rumah dan KK	Capaian : 83.52 % Dengan rincian : Jumlah KK : 152.919 ----- x 100 % Jumlah total unit rumah : 182.424	DPRKP	
24	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah pembangunan baru	0	DPRKP	
25	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	31 perumahan	DPRKP	
26	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	DPRKP	
27	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	126 perumahan	DPRKP	
28	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0	DPRKP	
29	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	126 perumahan	DPRKP	
30	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	DPRKP	
31	Perumahan Rakyat	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	DPRKP	
32	Perumahan Rakyat	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	DPRKP	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Perumahan Rakyat	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DPRKP	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	109	SATPOLPP	
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	224	SATPOLPP	
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	23	SATPOLPP	
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	7	SATPOLPP	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6	SATPOLPP	
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	408	SATPOLPP	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun : 1 ----- x 100 % Jumlah satu dokumen KRB Yang lengkap dan sudah disahkan : 1	DISDAMKAR	
8	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Capaian : 72.84 % Dengan rincian : Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana : 210646 ----- x 100 % Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana : 289185	DISDAMKAR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	Capaian : NaN % Dengan rincian : Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun : 0 ----- x 100 % Kemajuan pekerjaan dokumen yang disahkan : 0	DISDAMKAR	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi belum Mempunyai Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana baik yang dalam proses penyelesaian maupun yang sudah selesai di Tahun 2020 (Surat Pernyataan Terlampir)
10	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal	Capaian : NaN % Dengan rincian : Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun : 0 ----- x 100 % Kemajuan pekerjaan dokumen yang sudah disahkan : 0	DISDAMKAR	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi belum Mempunyai Dokumen Rencana Kontijensi baik yang dalam proses penyelesaian maupun yang sudah selesai di Tahun 2020 (Surat Pernyataan Terlampir)
11	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dan mitigasi bencana	Capaian : 0.65 % Dengan rincian : Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan : 1871 ----- x 100 % Jumlah warga negara yang berada kawasan rawan bencana : 289185	DISDAMKAR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Capaian : 0.64 % Dengan rincian : Jumlah warga negara yang ikut pelatihan : 1852 ----- x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana : 289185	DISDAMKAR	
13	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops : 289185 ----- x 100 % Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana : 289185	DISDAMKAR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan : 289185 ----- x 100 % Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana : 289185	DISDAMKAR	
15	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB : 0 ----- x 100 % Jumlah seluruh penetapan status KLB : 0	DISDAMKAR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana : 0 ----- x 100 % Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana : 0	DISDAMKAR	
17	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Capaian : 73.53 % Dengan rincian : Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana : 150 ----- x 100 % Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana : 204	DISDAMKAR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi : 70 ----- x 100 % Jumlah korban keseluruhan dari bencana : 70	DISDAMKAR	
19	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	12	DISDAMKAR	
20	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ADA	DISDAMKAR	5 Pos Sektor Damkar yang dilengkapi Sarana dan Prasarana + 1 Markas Komando
21	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ADA	DISDAMKAR	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	TIDAK ADA	DISDAMKAR	Belum tersedia Pos Damkar di setiap Kelurahan/Desa
23	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	74	DISDAMKAR	
24	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	206	DISDAMKAR	
25	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	132	DISDAMKAR	
26	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	4	DISDAMKAR	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

URUSAN Sosial KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	DINSOS	
2	Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	3000 Jiwa	DINSOS	
3	Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		DINKES	
4	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	2016 Jiwa	DINSOS	
5	Sosial	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 Unit	DINSOS	
6	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	275 Jiwa	DINSOS	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2 GEDUNG	DINSOS	
8	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	DINSOS	
9	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	24 Jiwa	DINSOS	
10	Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	1 BUAH	DINSOS	
11	Sosial	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	331 Jiwa	DINSOS	
12	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	331 Jiwa	DINSOS	
13	Sosial	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1 ORANG	DINSOS	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Sosial	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		DINKES	
15	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	115 Jiwa	DINSOS	
16	Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1000 Jiwa	DINSOS	
17	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	DINSOS	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	DINSOS	
19	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2 Jiwa	DINSOS	
20	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	2 Jiwa	DINSOS	
21	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	7	DINSOS	
22	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	846 Jiwa - 0	DINSOS	
23	Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	3 Tim	DINSOS	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Sosial	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2 Jiwa	DINSOS	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Tenaga Kerja KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Capaian : 22.22 % Dengan rincian : Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n : 2 ----- x 100 % kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n : 9	DTKK	
2	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Capaian : 35.00 % Dengan rincian : Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n : 42 ----- x 100 % jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n : 120	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Capaian : 92.31 % Dengan rincian : Jumlah instruktur pada tahun n : 120 ----- x 100 % jumlah peserta pelatihan pada tahun n : 130	DTKK	
4	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	Capaian : 11.54 % Dengan rincian : Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n : 3 ----- x 100 % jumlah seluruh LPK pada tahun n : 26	DTKK	
5	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n : 26 ----- x 100 % Jumlah LPK yang terdata pada tahun n : 26	DTKK	
6	Tenaga Kerja	Jumlah penganggur yang dilatih	130	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n : 130 ----- x 100 % jumlah orang yang dilatih pada tahun n : 130	DTKK	
8	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan	Capaian : 52.31 % Dengan rincian : Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n : 68 ----- x 100 % jumlah lulusan pada tahun n : 130	DTKK	
9	Tenaga Kerja	Lulusan bersertifikat kompetensi	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n : 130 ----- x 100 % jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n : 130	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : CPMI dilatih : 7 ----- x 100 % CPMI terdaftar : 7	DTKK	
11	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	7	DTKK	
12	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Capaian : 0.21 % Dengan rincian : Jmlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n : 4 ----- x 100 % jumlah perusahaan pada tahun n : 1914	DTKK	
13	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total	- - -	DTKK	Terlampir surat permintaan ke BPS Kota Jambi

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Capaian : 14.79 % Dengan rincian : Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n : 287 $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100 \%$ 10 orang atau lebih : 1941	DTKK	
15	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Capaian : 151.61 % Dengan rincian : Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 47 $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100 \%$ Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 31	DTKK	
16	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	116	DTKK	- Aktif : 75 - Tidak Aktif : 41

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Capaian : 12.20 % Dengan rincian : Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah : 35 ----- x 100 % Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) : 287	DTKK	
18	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Capaian : 317.21 % Dengan rincian : Jumlah perusahaan yang sdah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan : 6157 ----- x 100 % Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor : 1941	DTKK	
19	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Capaian : 0.44 % Dengan rincian : Jumlah perusahaan yang berselisih : 76 ----- x 100 % Jumlah perusahaan pada tahun n : 17293	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	0	DTKK	
21	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	2	DTKK	
22	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	1	DTKK	
23	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	DTKK	
24	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan PHK	72	DTKK	
25	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	121	DTKK	
26	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	25	DTKK	
27	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	2	DTKK	
28	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Capaian : 61.84 % Dengan rincian : Jumlah perjanjian bersama : 47 ----- x 100 % Jumlah kasus perselisihan : 76	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	760	DTKK	
30	Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3735	DTKK	
31	Tenaga Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	22	DTKK	
32	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	10	DTKK	
33	Tenaga Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	DTKK	2 Orang bersertifikat, tetapi belum menjabat menjadi pejabat fungsional
34	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	DTKK	
35	Tenaga Kerja	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	7	DTKK	
36	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi : 120 ----- x 100 % CPMI/CTKI : 120	DTKK	
38	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	7	DTKK	
39	Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Capaian : NaN % Dengan rincian : Fasilitasi PMI yang di pulangkan : 0 ----- x 100 % PMI yang pulang : 0	DTKK	tidak ada
40	Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja : 7 ----- x 100 % PMI/TKI : 7	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	Tenaga Kerja	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Capaian : NaN % Dengan rincian : PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan : 0 ----- x 100 % PMI/TKI purna dan keluarganya : 0	DTKK	Tidak ada
42	Tenaga Kerja	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	Capaian : NaN % Dengan rincian : LTSE yang terbentuk : 0 ----- x 100 % Jumlah daerah kantong PMI/TKI : 0	DTKK	Untuk LTSA Jambi sejauh ini hanya berada di Kota Sungai Penuh. Sehingga untuk data LTSA Kota Jambi tidak memilikinya.
43	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1 Dokumen	DTKK	
44	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Capaian : NaN % Dengan rincian : Realisasi Indikator - target indikator : 0 ----- x 100 % realisasi : 0	DTKK	Data persentase akurasi proyeksi indikator dalam Rencana Tenaga Kerja Kota Jambi tidak ada karena belum dilakukan perhitungan

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	DTKK	Belum ada perusahaan di Kota Jambi yang memiliki Rencana Tenaga Kerja Mikro pada tahun 2020

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	18	DPMPPA	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	25	DPMPPA	
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3	DPMPPA	
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Capaian : 24.31 % Dengan rincian : Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani : 53 ----- x 100 % Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Provinsi : 218	DPMPPA	53 adalah Jumlah kasus Kekerasan anak tahun 2020 yang ada UPTDPPA kota Jambi 218 adalah Jumlah data kasus kekerasan anak yang ada di UPTDPPA Provinsi Jambi

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	6	DPMPPA	
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)h lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	DPMPPA	
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihanJumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	9	DPMPPA	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	73	DPMPPA	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	6	DPMPPA	
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	DPMPPA	
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	DPMPPA	
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandisasi	3	DPMPPA	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan : 77 ----- x 100 % Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan : 77	DPMPPA	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

URUSAN Pangan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0	DPKP	TIDAK ADA
2	Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0	DPKP	TIDAK ADA
3	Pangan	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	DPKP	TIDAK ADA
4	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	6 KWT dalam 11 Kecamatan	DPKP	ADA
5	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	25 eksmplar 3 peta	DPKP	ADA
6	Pangan	Tertanganinya kerawanan Pangan	4 Kelurahan	DPKP	ADA
7	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	4.695 KG (4,7 TON)	DPKP	ADA

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	80 sampel	DPKP	ADA

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Pertanahan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) : 0 ----- x 100 % Dalam 1 Tahun : 0	PEM	
2	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimm absentee : 0 ----- x 100 % Panitia pertimbangan Landreform : 0	PEM	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada berkas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee : 0 ----- x 100 % Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek : 0	PEM	
4	Pertanahan	Dokumen Izin membuka tanah	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah izin membuka tanah yang ditolak : 0 ----- x 100 % Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun : 0	PEM	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pertanahan	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik : 0 ----- x 100 % Lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun : 0	PEM	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Lingkungan Hidup KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	a. 39,60 b. 84,51 c. 44,82	DLH	a. indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
2	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. 95,03415, 2. 58.82, 3. Tidak ada TPST	DLH	1. Data rasio volume angkutan sampah berdasarkan hitungan perhari 2. DLH Kota Jambi belum memiliki TPST
3	Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Capaian : 86.87 % Dengan rincian : izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota : 86 ----- x 100 % Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi : 99	DLH	-

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Capaian : 1.16 % Dengan rincian : Jumlah PPLHD yang ada : 1 ----- x 100 % Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kab/Kota : 86	DLH	-
5	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah MHA yang di akui : 0 ----- x 100 % Jumlah usulan MHA : 0	DLH	DLH kota Jambi tidak memiliki MHA
6	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah MHA mendapatkan pelatihan : 0 ----- x 100 % Jumlah MHA yang ada : 0	DLH	DLH Kota Jambi tidak memiliki MHA

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Capaian : % Dengan rincian : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diber diklat/rencana : ----- x 100 % Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat :	DKPS	
8	Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Pengaduan masyarakat yang ditangani : 32 ----- x 100 % total Jumlah Pengaduan masyarakat yang terergristrasi : 32	DLH	-
9	Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberikan diklat/rencana : 0 ----- x 100 % Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat : 0	DLH	DLH Kota Jambi tidak ada masyarakat yang berikan diklat

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan Akta Perkawinan	Capaian : 85.78 % Dengan rincian : Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan : 19691 ----- x 100 % Peristiwa perkawinan yang dilaporkan : 22956	DKPS	Tersedia
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	Capaian : 59.25 % Dengan rincian : Jumlah akta perceraian yang diterbitkan : 634 ----- x 100 % Peristiwa perceraian yang dilaporkan : 1070	DKPS	Tersedia
3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun : 2 ----- x 100 % 2 Tahun : 2	DKPS	Tersedia

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta kematian	Capaian : 84.85 % Dengan rincian : Jumlah akta kematian yang diterbitkan : 8738 ----- x 100 % Peristiwa kematian yang dilaporkan : 10298	DKPS	Tersedia

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Pengendalian penduduk dan keluarga berencana KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Laporan Akhir Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Jambi Tahun 2020-2035	DPPKB	
2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	> 21 TAHUN	DPPKB	>
3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	$11/394 \times 1000 = 27,01$	DPPKB	
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) : 745 ----- x 100 % Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) : 745	DPPKB	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	5	DPPKB	
6	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP : 106 ----- x 100 % Jumlah faskes : 106	DPPKB	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Capaian : 13.79 % Dengan rincian : Jumlah peserta KB aktif : 7493 ----- x 100 % Jumlah PUS : 54323	DPPKB	
8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	87282 + 4537 + 1763 + 3317 = 22120	DPPKB	
9	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Capaian : 7.83 % Dengan rincian : Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern : 1354 ----- x 100 % Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan : 17288	DPPKB	
10	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	24 %	DPPKB	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Capaian : 65.07 % Dengan rincian : Jumlah peserta KB pada Keluarga penerima PBI : 12045 ----- x 100 % Jumlah keluarga PBI : 18511	DPPKB	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Perhubungan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Capaian : 35.29 % Dengan rincian : Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan TIPE C yang tersedia : 12 ----- x 100 % Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan : 34	DISHUB	
2	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Capaian : 90.71 % Dengan rincian : Jumlah kendaraan yang diuji per tahun : 24293 ----- x 100 % Jumlah kendaraan wajib uji : 26780	DISHUB	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah Penetapan tarif lintas penyeberangan : 15 ----- x 100 % Jumlah Lintas Penyebrangan dalam Kabupaten atau Kota : 15	DISHUB	
4	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Capaian : 69.69 % Dengan rincian : Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota : 7676 ----- x 100 % Target Kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota : 11015	DISHUB	
5	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Capaian : 69.69 % Dengan rincian : Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota : 7676 ----- x 100 % Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota : 11015	DISHUB	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Komunikasi dan Informatika KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Capaian : 78.05 % Dengan rincian : Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas Kominfo : 32 ----- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah : 41	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
2	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Capaian : 78.05 % Dengan rincian : Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo : 32 ----- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah : 41	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
4	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Capaian : 98.28 % Dengan rincian : Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 : 114 ----- x 100 % Jumlah Kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah : 116	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Capaian : 95.12 % Dengan rincian : Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar : 39 ----- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah : 41	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
6	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan : 41 ----- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah : 41	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Layanan SPBB (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) ag tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik : 16 ----- x 100 % Jumlah layanan : 16	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
8	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Capaian : 7.84 % Dengan rincian : Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik : 4 ----- x 100 % Jumlah Layanan : 51	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan : 61 ----- x 100 % Jumlah sistem elektronik : 61	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
10	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Capaian : 9.84 % Dengan rincian : Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah : 6 ----- x 100 % Jumlah layanan publik dan layanan administrasi : 61	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Capaian : 97.56 % Dengan rincian : Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah : 40 ----- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah : 41	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
12	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Capaian : 39.02 % Dengan rincian : Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat : 16 ----- x 100 % Jumlah perangkat daerah : 41	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
13	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah Perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya : 0 ----- x 100 % Jumlah perangkat daerah : 0	DISKOMINFO	Belum memiliki acuan waktu yang tepat untuk memperbaharui data oleh masing-masing OPD

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah data yang dapat berbagi pakai : 386 ----- x 100 % Jumlah data yang memiliki pemerintahan daerah : 386	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
15	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Capaian : 36.59 % Dengan rincian : Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city : 15 ----- x 100 % jumlah perangkat daerah : 41	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Capaian : 48.39 % Dengan rincian : Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo : 15 ----- x 100 % Jumlah ASN pengelola TIK : 31	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
17	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
18	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Capaian : 63.64 % Dengan rincian : Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah : 7 ----- x 100 % Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintahan daerah Provinsi : 11	DISKOMINFO	Komunitas masyarakat/mitra strategis termasuk diantaranya KIM Dokumen Terlampir

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Capaian : 91.80 % Dengan rincian : Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) : 1377 ----- x 100 % Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi : 1500	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
20	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Capaian : 78.00 % Dengan rincian : Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP : 780 ----- x 100 % Desiminasi dan layanan Informasi Publik : 1000	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Koperasi, usaha kecil dan menengah KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada	DTKK	
2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Capaian : NaN % Dengan rincian : Realisasi indikator - target indikator : 0 ----- x 100 % Realisasi : 0	DTKK	
3	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	DTKK	
4	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 8.26 % Dengan rincian : Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan : 18 ----- x 100 % Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam : 218	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor usaha simpan pinjam pada tahun yang di laporkan : 1 ----- x 100 % Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan : 1	DTKK	
6	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 45.87 % Dengan rincian : Jumlah koperasi yang diperiksa dan di awasi : 100 ----- x 100 % Jumlah Koperasi yang ada : 218	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 22.94 % Dengan rincian : Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya : 50 ----- x 100 % Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada : 218	DTKK	
8	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 35.32 % Dengan rincian : Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan : 77 ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada : 218	DTKK	
9	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota dengan wilayah keanggotaan	Capaian : 4.25 % Dengan rincian : Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian : 638 ----- x 100 % Jumlah anggota koperasi yang ada : 15003	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 0.46 % Dengan rincian : Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan : 1 ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada : 218	DTKK	
11	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	34	DTKK	
12	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 26.61 % Dengan rincian : Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) : 58 ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada : 218	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 15.60 % Dengan rincian : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemayaan : 34 ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada : 218	DTKK	
14	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 5.96 % Dengan rincian : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran : 13 ----- x 100 % Jumlah Koperasi yang ada : 218	DTKK	
15	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 11.47 % Dengan rincian : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha : 25 ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada : 218	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Capaian : 18.35 % Dengan rincian : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan : 40 ----- x 100 % Jumlah Koperasi yang ada : 218	DTKK	
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Capaian : 4.75 % Dengan rincian : Jumlah pertumbuhan wirausaha baru : 340 ----- x 100 % jumlah wirausaha yang ada : 7157	DTKK	
18	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) : 0 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang ada : 0	DTKK	Beum ada data yang diinput ke ODS (Aplikasi belum di launching Kemen Kop dan UKM RI)

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah usaha mikro yang bermitra : 7157 ----- x 100 % jumlah usaha mikro yang ada : 7157	DTKK	
20	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Capaian : 0.75 % Dengan rincian : Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi : 53 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk : 7104	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Capaian : 16.21 % Dengan rincian : Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran : 1160 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran : 7157	DTKK	
22	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Capaian : 16.21 % Dengan rincian : Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan : 1160 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang ada : 7157	DTKK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Capaian : 16.21 % Dengan rincian : Jumlah usah mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha : 1160 ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang ada : 7157	DTKK	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Penanaman Modal KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPTSP	Belum ada PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
2	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	DPMPTSP	Tidak Ada Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
3	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	DPMPTSP	Tidak Ada Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
4	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Tidak ada Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	DPMPTSP	Tidak ada Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting
5	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	Tidak ada Kegiatan pameran penanaman modal	DPMPTSP	Tidak ada Kegiatan pameran penanaman modal
6	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Belum ada	DPMPTSP	Belum ada kegiatan penerimaan misi penanaman modal

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	38	DPMPTSP	Ada
8	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	6229	DPMPTSP	Ada
9	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	249.446.980.393	DPMPTSP	Ada
10	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	91 Perusahaan	DPMPTSP	Ada
11	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	91 Perusahaan	DPMPTSP	Ada
12	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	16	DPMPTSP	Ada

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Kepemudaan dan Olahraga KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	60 Orang	DISPORA	Jumlah peserta kegiatan seleksi dan seminar kewirausahaan pemuda di Kota Jambi tahun 2020
2	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-	DISPORA	Belum ada pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 serta keterbatasan anggaran
3	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	100 Orang	DISPORA	Pemuda yang mengikuti kegiatan Bina Mental Pemuda di Kota Jambi tahun 2020
4	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	-	DISPORA	Belum adanya pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 serta keterbatasan anggaran

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	21 Orang	DISPORA	Terdiri dari 16 Orang Pealtih POPDA, 4 Orang Pelatih PPLPD dan 1 Orang Pelatih Sepak Bola Wanita)
6	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	-	DISPORA	Dikarenakan Pandemi COVID-19, Pelaksanaan event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah tahun 2020 ditiadakan

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

URUSAN Statistik KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
2	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
3	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	11 Data	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
4	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	DISKOMINFO	Belum ada survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
5	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	DISKOMINFO	Belum ada kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
6	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral : 0 ----- x 100 % Jumlah kegiatan statistik : 0	DISKOMINFO	Belum ada

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah metadata indikator statistik sektoral : 0 ----- x 100 % Jumlah indikator statistik sektoral : 0	DISKOMINFO	Belum ada

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Persandian KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Capaian : 120.00 % Dengan rincian : Jumlah kegiatan strategis teramankan : 12 ----- x 100 % Jumlah kegiatan strategis yang ada : 10	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir
2	Persandian	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian : 24 ----- x 100 % Jumlah SE aplikasi yang ada : 24	DISKOMINFO	Dokumen Terlampir

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Capaian : 0.00 % Dengan rincian : Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah : 0 ----- x 100 % Jumlah SE yang ada : 24	DISKOMINFO	Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan Dokumen Terlampir
4	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah titik teramanakan : 1 ----- x 100 % Jumlah titik pada PHKS : 1	DISKOMINFO	Pola hubungan komunikasi sandi adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan menerangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan didalamnya dipatuhi.

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Kebudayaan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5	DPK	
2	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	0	DPK	
3	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2	DPK	
4	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	DPK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemerinkatan, penghapusan)	79	DPK	
6	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	DPK	
7	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DPK	
8	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	DPK	
9	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	DPK	
10	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DPK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	DPK	
12	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DPK	
13	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	DPK	
14	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	DPK	
15	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	DPK	
16	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	DPK	
17	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	DPK	
18	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	DPK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	DPK	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Perpustakaan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Capaian : 9.47 % Dengan rincian : Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) : 58178 ----- x 100 % Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) : 614329	DKP	
2	Perpustakaan	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Capaian : 2.29 % Dengan rincian : Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite : 14078 ----- x 100 % Jumlah penduduk di wilayahnya : 614329	DKP	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.025	DKP	(ketersediaan tenaga perpustakaan diberbagai perpustakaan diwilayahnya/ jumlah penduduk diwilayahnya (dalam jiwa)) * 100% (157/614329) * 100% = 0.025
4	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Capaian : 0.00 % Dengan rincian : Jumlah Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan : 0 ----- x 100 % Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya : 310	DKP	
5	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	3 kegiatan	DKP	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	DKP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi menerangkan bahwa penjelasan IKK Output Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat jumlah naskah kuno yang diakuisisi / dialihmedia(digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya sampai dengan tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi belum melaksanakan pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat dalam kota jambi
7	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	DKP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi belum melaksanakan pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat dalam Kota Jambi
8	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	DKP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi belum melaksanakan pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat dalam Kota Jambi

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Kearsipan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip : 1655 ----- x 100 % Jumlah seluruh arsip aktif : 1655	DKP	
2	Kearsipan	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Capaian : 92.83 % Dengan rincian : Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip : 13015 ----- x 100 % Jumlah seluruh arsip inaktif : 14021	DKP	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Capaian : 0.00 % Dengan rincian : Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik : 0 ----- x 100 % Jumlah seluruh arsip statis : 5517	DKP	
4	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Capaian : 0.05 % Dengan rincian : Jumlah arsip yang telah di masukan dalam SIKN melalui JIKN : 10 ----- x 100 % Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi : 21609	DKP	
5	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1872	DKP	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	DKP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi pada tahun 2020 menerangkan penjelasan IKK output pada perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana belum ada
7	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	DKP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi pada tahun 2020 menerangkan penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah belum ada

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	0	DKP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi pada tahun 2020 menerangkan bahwa autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik belum ada
9	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	DKP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi menerangkan bahwa pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK belum dilaksanakan
10	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	0	DKP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi menerangkan bahwa pada tahun 2020 penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/kota yang sesuai NSPK belum ada

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Kelautan dan Perikanan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	45 Orang	DPKP	ADA
2	Kelautan dan Perikanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Capaian : NaN % Dengan rincian : Jumlah TPI yang operasional : 0 ----- x 100 % Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota : 0	DPKP	TIDAK ADA
3	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	DPKP	TIDAK ADA

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	20 Kelompok	DPKP	ADA
5	Kelautan dan Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	79.930.670 Ekor	DPKP	ADA

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Pariwisata KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	19	DPK	
2	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0	DPK	
3	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten/kota	40	DPK	
4	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1	DPK	
5	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3	DPK	
6	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	DPK	
7	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	3	DPK	

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	225 orang	DPK	
9	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan : 160 ----- x 100 % Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan : 160	DPK	
10	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	7 kelompok	DPK	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

URUSAN Pertanian KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	12 ITEM (SARANA) DAN 14 ITEM (PRASARANA)	DPKP	ADA
2	Pertanian	Jumlah Prasaran pertanian yang digunakan	Prasarana = 14 Item	DPKP	ADA
3	Pertanian	Jumlah Penerbitan izin usaha pertanian	0	DPKP	TIDAK ADA
4	Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah prasarana yang aktif di gunakan : 14 ----- x 100 % jumlah prasarana yang di bangun : 14	DPKP	ADA
5	Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Capaian : 71.43 % Dengan rincian : Jumlah usulan yang difasilitasi : 10 ----- x 100 % Jumlah usulan usaha pertanian : 14	DPKP	ADA

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah area yang dapat ditanggulangi : 11 ----- x 100 % Luas area terkena bencana : 11	DPKP	ADA

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Perdagangan KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a.6 b.156	DPP	Data Terlampir
2	Perdagangan	Persentase penerbitan TDG	Capaian : 100.00 % Dengan rincian : Jumlah penerbitan TDG < 5 hari kerja : 52 ----- x 100 % Jumlah permohonan penerbitan TDG : 52	DPP	Data Terlampir
3	Perdagangan	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Capaian : 71.23 % Dengan rincian : Jumlah penerbitan TDG : 52 ----- x 100 % Jumlah Gudang yang ada di Kabupaten Kota : 73	DPP	Data Terlampir

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Perdagangan	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		DPP	Kegiatan belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan di tahun 2021
5	Perdagangan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Capaian : % Dengan rincian : Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab Kota : ----- x 100 % Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer :	DPP	Kegiatan belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan di tahun 2021

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Perdagangan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Capaian : % Dengan rincian : Jumlah SKA yang terbit < 1 hari kerja (1X 24 jam) : ----- x 100 % Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar :	DPP	Kegiatan belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan di tahun 2021
7	Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %	DPP	Data Terlampir
8	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	1,49%	DPP	Data Terlampir
9	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		DPP	Kegiatan Belum Dilaksanakan

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Perdagangan	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Capaian : 58.27 % Dengan rincian : Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang tahun berjalan : 4104 ----- x 100 % Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kab Kota : 7043	DPP	
11	Perdagangan	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Capaian : % Dengan rincian : Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku : ----- x 100 % total sampel BDKT yang diawasi dalam Tahun berjalan :	DPP	Kegiatan Belum Dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
URUSAN Perindustrian KOTA JAMBI TAHUN 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Capaian : % Dengan rincian : Jumlah realisasi izin yang diterbitkan : ----- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk :	DPP	Kegiatan Belum dilakukan pada tahun 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		DPP	Dengan Ini Menerangkan Bahwa persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK belum dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) masih dalam proses, dimana RPIK merupakan turunan dari RPIP dan Naskah Akademik RPIK yang sudah disusun akan diperbaharui lagi jika sudah ada turunan dari RPIP, sehingga RPIK belum bisa di proses lebih lanjut.

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Perindustrian	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Capaian : % Dengan rincian : Jumlah realisasi izin yang diterbitkan : ----- x 100 % jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk :	DPP	Dengan ini Menerangkan Bahwa jumlah Penetapan izin Yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan, bahwa Pembuatan IUI Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi hanya mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan permohonan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
4	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Capaian : % Dengan rincian : Jumlah realisasi izin yang diterbitkan : ----- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk :	DPP	Kegiatan Belum Dilakukan Pada Tahun 2020

NO	URUSAN	IKK KELUARAN (Output)	CAPAIAN KERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Capaian : % Dengan rincian : Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SIINas : ----- x 100 % Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota :	DPP	Kegiatan Belum Dilakukan Pada Tahun 2020